



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



Mini Retribusi di Laut nan Kaya

Petikan Peningat



Sejak kecil kita sering mendengar petikan lagu. “Nenek moyang kita adalah pelaut, gemar mengarungi luas samudera,” begitu petik sepenggal bait lagu nenek moyangku.

Bahkan hingga dewasa, frasa ini masih sering dilontarkan dengan penuh kebanggaan dalam kehidupan sehari-hari.

Bak menjadi pengingat, jika jauh sebelum menjadi negara yang terbagi dari ratusan kota dan kabupaten. Para pendahulu kita, telah lebih dulu melabuhkan kehidupannya dengan berlayar dan mengarungi jauhnya samudera. Dari mulai menggunakan dayung hingga berkembang dengan bantuan layar, disusul mesin uap dan akhirnya mesin diesel.

Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon?

Sudah pasti. Cirebon, bahkan terkenal bagi kebanyakan orang dengan sebutan ‘kota udang’. San-

dangan nama yang seakan mewakili kaya akan hasil lautannya.

Karena itu, Cirebon Katon tertarik untuk memilih tema salah satu sektor kelautan pada edisi kali ini. Kami sajikan informasi dan kondisi yang ada dari hasil laut Kabupaten Cirebon bagi para pembaca setia. Pastinya dengan senantiasa mengikuti kaidah dan aturan jurnalistik.

Meskipun, para reporter kami mengalami berbagai kendala dalam mengumpulkan dan mengolah data hingga mencari narasumber. Namun komitmen menyuguhkan bacaan bagi pembaca, menjadi penyemangat kami melewatinya.

Kami menyadari, informasi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami menunggu masukan dan saran konstruktif para pembaca setia.

Pada akhirnya selamat membaca Cirebon Katon.

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Siska Karina, MH
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Handi Eko Prasetyo, S.Kom, MM
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Dra. Puti Amanah Sari
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Maulana • Mu'izz • Hasan • Sarah

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS
Perikanan Tangkap
Besarnya Potensi Mini Retribusi

6 | TPI Lemah, Siapa Salah?

11 | Hanya Andalkan Program Pendampingan



18 | PUBLIKA
Usul Pembukaan Jalur Khusus Sepeda



20 | INSPIRASI
Rumah Rengganis
Tawarkan Ketenangan Bagi Pecinta Buku



22 | LENSA
Telur Asin Khas Kroya Diolah dari Bata Merah



24 | PROFIL
Tarseni
Pernah Jadi TKW di Taiwan

26 | Mochammad Ghofur Akbar
Sempat Jadi Supir Taksi

28 | DINAMIKA
Komisi I Ingatkan Prokes Pilwu Serentak

30 | Komisi II Tinjau Pembuangan Limbah PT RCPI

32 | Komisi III Desak Normalisasi Irigasi Sungai Ciberes

34 | Komisi IV Minta Puskesmas Bangodua Aktif Dampingi Ibu Hamil



36 | POTENSI
Titisara Ciawigajah jadi Kampung Ternak



38 | DESA
Wanasaba Lor
Siapkan Bumdes Miliki Produk Makanan

Perikanan Tangkap Besar Potensi Mini Retribusi

Nilai retribusi sektor perikanan yang dikelola melalui TPI dinilai masih jauh dari harapan. Berbanding balik dengan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Cirebon. Mengapa?



xp/lornd: opj-000

Tepat di garis utara Jawa Barat, Kabupaten Cirebon memiliki garis pantai yang melintang sepanjang 77,97 kilometer dari Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan di ujung barat hingga Kecamatan Losari di ujung timur. Sementara luas wilayah perairannya mencapai 399,6 km persegi. Maka tak ayal perikanan menjadi salah satu potensi yang besar sebagai mata pencaharian warga pesisir Kabupaten Cirebon.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Cirebon melaporkan, jumlah nelayan di Kabupaten Cirebon per Agustus 2021 mencapai 17.965 nelayan. Terdiri; nelayan penuh sebanyak 15.320 dan nelayan sambilan 2.645 nelayan. Sedangkan total unit kapal ikan penangkap sejumlah 4.400 unit. Yang terbagi 210 kapal ukuran di atas 5 GT dan 4.190 kapal kurang dari 5 GT.

Selain itu, DKP juga mencatat capaian produksi perikanan Kabupaten Cirebon sejumlah 3.847 ton pada 2020 yang sedikit meningkat dari tahun 2019 dengan capaian 3.644 ton.

Jumlah tersebut terdiri dari beragam hasil laut di antaranya: cumi cumi, blekutak, pirik, klapen, pari, trisi, bloso, kembung, teri, baramudi, tongkol, tanjan tembang, bilis, klapen, slanget, rajungan, gulama, barakuda, kakap, udang hingga gurita.

Hasil tangkapan perikanan para nelayan, selain ikan untuk lauk pauk keluarga, hasil rekreasi dan penelitian maupun ikan jenis ekspor diharuskan menjualnya melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah ditetapkan. TPI dibentuk melalui koperasi desa yang direkomendasikan bupati.

Saat ini terdapat tujuh TPI yang menjadi sentra pelelangan hasil laut yaitu, TPI Karang Reja Suranenggala, TPI Bungko Lor Kapetakan, TPI Bondet Gunungjati, TPI Selopengantin Mundu, TPI Ender Pangenan, TPI Gebang Mekar dan TPI Ambulu di Losari.

Padahal dalam mengatur pengelolaan TPI, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan TPI.



Dalam Perda disampaikan, pemda memiliki kewenangan mengatur, mengurus dan mengawasi TPI. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, mendapatkan kepastian pasar harga ikan yang layak bagi nelayan dan konsumen, menggali potensi dan sumber daya kelautan serta meningkatkan sumber daya manusia.

Hasil pelelangan ikan di TPI, Perda mengatur sebesar 3 persen dari transaksi diambil sebagai retribusi daerah. Rinciannya, 2 % dibebankan kepada nelayan dan sisanya pemenang lelang. Pemungutan dana tersebut nantinya dipergunakan untuk pembiayaan lelang, tabungan nelayan, dana paceklik, dana sosial, pengamanan TPI, bantuan

kas desa maupun dana asuransi.

Retribusi TPI Kecil

Namun, alih-alih menjadi penggerak ekonomi daerah maupun salah satu penyumbang sektor retribusi tertinggi, realisasi pendapatan dari TPI di Kabupaten Cirebon masih jauh dari harapan maupun potensi yang ada.

Tak hanya itu, data produksi hasil laut yang tercatat DKP Kabupaten Cirebon dari Januari hingga Agustus 2021 pun baru 5 TPI. Rinciannya; TPI Gebang Mekar 3.400.356 kg; TPI Bungko Lor 35.287 kg; TPI Bondet 193.794 kg; TPI Karangreja 121.353 serta TPI Ambulu 3.622 kg.

Walhasil PAD yang didapat dimulai 2019 dari 4 TPI aktif misalnya, hanya mampu meraup sekira

Rp 68,6 juta. Sedangkan pada 2020 nilainya hanya Rp 27,9 juta. Sementara laporan terakhir hingga Juli 2021 nilai PAD yang masuk baru mencapai Rp 41,72 juta dari target Rp 89 juta di akhir tahun.

Kepala Seksi TPI DKP Kabupaten Cirebon Nia Nurhayati pun juga mengakui, jika realisasi PAD dari pengelolaan TPI di Kabupaten Cirebon jauh lebih buruk bila dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Indramayu. Penyebabnya karena jumlah TPI dan kapal tangkap ikan yang tergolong sedikit.

"Kalau di Kabupaten Indramayu mereka memiliki 14 TPI dengan total kapal 6.074 buah. Sangat jauh dari kabupaten kita," ungkapnya.

Maka tak aneh pada 2020 lalu, nilai retribusi penyediaan TPI Kabupaten Indramayu mampu mencapai Rp 10,5 miliar. Capaian tersebut bahkan melebihi targetnya senilai Rp 7,5 miliar.

Nia menilai, anjaknya PAD dari retribusi pengelolaan TPI di Kabupaten Cirebon, dikarenakan saat ini banyak TPI yang mangkrak. Hanya TPI Gebang Mekar, Karang Reja, TPI Bondet dan TPI Bungko Lor yang masih berjalan.

"Itu pun tersisa nelayan yang masih menimbang melalui TPI Karang Reja sekitar 19 Nelayan. Di TPI Bondet sekitar ada 25. Sedangkan, 20 nelayan menimbang di TPI Bungko Lor," katanya.

Akibatnya tidak hanya dengan Indramayu, PAD perikanan Kabupaten Cirebon terpaut jauh. Jika dibandingkan dengan Kota Cirebon yang serumpun pun tak mampu bersaing. Seperti yang tercatat Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kota Cirebon, nilai PAD TPI Kewenangan hingga Agustus 2021 telah mencapai Rp 800 juta dari targetnya Rp 1,1 miliar. • Muiz

TPI Lemah, Siapa Salah?

DKP mencatat dari total 7 TPI, hanya 3 TPI yang masih konsisten hasilkan retribusi daerah. Selebihnya mangkrak dan vakum. Mengapa bisa terjadi?



foto: foto: Quasy/ik

Tepat saat terik matahari terasa menyengat di Desa Gebang Mekar, puluhan perahu tengah melaju ke arah daratan. Sebagian deretan perahu kecil berkisar 3 Gross Tonage (GT) juga telah bersandar di sepanjang hilir sungai bibir Pantai Baro. Waktu siang, sebelum menjelang asar adalah waktu para nelayan Gebang Mekar pulang melaut.

Darsono, pria lansia sedang duduk di perahu dengan tatapan nanar. Ia memang tengah beristirahat setelah sejak pagi buta be-

rangkat *miyang* (mencari ikan). Sudah puluhan tahun Darsono bergulat menjadi nelayan. "Iya ini satu-satunya pekerjaan yang saya geluti sejak muda," ucapnya lirih.

Berbekal alat tangkap dan modal seadanya, setiap hari, Darsono melajukan perahu miliknya berukuran kurang dari 5 GT untuk berangkat *miyang* dari pukul 3 pagi hingga 14.00 siang.

"Di sana hanya 6 jam karena alat yang saya punya hanya jaring. Jadi kadang 3 kali tarikan terus pulang. Dengan modal Rp

1 juta, beli solar 100 liter. Ya jika dihitung Rp 6000 x 100 liter itu saja sudah Rp 600 ribu, sisanya buat bekal makanan," terangnya.

Bagi Darsono dan para nelayan lainnya, kondisi cuaca sangat berpengaruh pada hasil tangkapan. Bulan ini sudah masuk musim ketiga. Di mana kondisi ombak dan angin laut sedang tak menentu. Akibatnya, Darsono mengaku jika hasil tangkapannya tak sebanyak modal yang dikeluarkan.

"Musim ketiga ini lagi susah cari ikan mas. Kadang kalau be-



Nia Nurhayati, Kasi Pengelolaan TPI DKP Kabupaten Cirebon

rangkat bawa modal Rp 500 ribu hanya dapat keuntungan Rp 200 ribu. Enggak balik modal, selama enam jam di sana hanya boros di solar. Menunggu ikan sejam saja bisa menghabiskan 10 L solar. Bahkan terkadang pulang hanya dapat 1 sampai 5 kg saja," keluh Darsono, saat ditemui reporter Cirebon Katon.

Sekali berlayar, Darsono bisa mendapatkan beragam jenis hasil laut. Mulai dari cumi cumi, blekutak, pirik, klapan, pari, trisi, bloso, kembung, teri, baramudi hingga tongkol. Selanjutnya, Darsono akan menjualnya melalui bakul di sekitar rumahnya. Ia tak melelangnya melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah berdiri di Gebang Mekar.

Alasannya, kata Darsono, kondisi TPI yang tak jauh dari ru-

mahnya saat ini sudah tak beroperasi. Maka tak ada pilihan lain selain menjualnya ke tengkulak. Yang Darsono pikirkan saat pulang ke rumah, ia harus membawa uang untuk keluarga.

"Kalau sudah selesai *miyang* ya saya langsung jual ke bakul. TPI di sini sudah tidak jalan lagi karena para nelayan dimodali oleh bakul. Jadi kalau untuk ngejual ya langsung ke bakul. Saya sih tidak pernah minjam ke bakul, cuman karena TPI engga jalan, ya saya jual ke bakul saja," jelas pria 50 tahun itu.

Terjerat Hutang Berlayar

Alasan Darsono masuk akal. Tak ada pilihan selain mengikuti keadaan untuk membiasakan diri menjual hasil tangkapannya ke para bakul.

Padahal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan TPI Bab 2 Pasal 1 mewajibkan hasil tangkapan laut dijual melalui TPI yang telah dibentuk berdasarkan rekomendasi bupati. Namun fakta di lapangan belum semuanya dapat diterapkan.

Pasalnya, dari jumlah total 7 TPI yang dimiliki Kabupaten Cirebon saja, hanya 3 TPI yang konsisten memberikan retribusi. Itu pun dengan nilai yang mini. Sebagian lagi statusnya mangkrak atau sewaktu-waktu saja beroperasi. Salah satunya TPI Gebang Mekar.

Rasnadi, anggota pengelola TPI Gebang Mekar mengatakan, mangkraknya TPI Gebang Mekar disebabkan karena para nelayan tak ada yang mau melelang di TPI. Pasalnya nelayan terjerat hutang modal dengan para bakul. Sehingga hasil tangkapannya pun dijual ke para bakul.

"TPI Gebang Mekar sudah vakum sejak setahun yang lalu karena persaingan kita (pengelola TPI) dengan bakul. Apalagi bakul kalau ngasih modal ke nelayan tak tanggung-tanggung. Ada yang sampai Rp 30 juta. Jadi hasil tangkapan nelayan mau tidak mau langsung dijualnya ke mereka," ungkap Rasnadi.

Akibatnya, para pengelola TPI Gebang Mekar memilih vakum dari TPI. Apalagi Rasnadi juga mengetahui, jika modal menjadi persoalan utama bagi para nelayan. Sementara di sisi lain, Koperasi Unit Desa (KUD) yang menaungi TPI juga tak memiliki kas untuk meminjamkan modal lantaran minimnya pemasukan.

Rasnadi hanya berharap, Pemkab Cirebon dapat memberi solusi agar TPI Gebang Mekar dapat beroperasi kembali dan

Capaian PAD TPI Kabupaten Cirebon

Nama TPI:
Pangkalan Pendaratan Ikan Bungko
Alamat:
Desa Bungko Lor, Kapetakan
Capaian PAD:
Rp 0 (2019), Rp 48 ribu (2020), Rp 1,5 juta (Juli 2021)
Hasil Produksi:
46.374 Kg



Nama TPI:
Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar
Alamat:
Desa Gebang Mekar, Gebang
Capaian PAD:
Rp 4 juta (2019), Rp 22,2 juta (2020), Rp 10,2 juta (Juli 2021)
Hasil Produksi:
2.633.902 Kg



Nama TPI:
Pangkalan Pendaratan Ikan Bondet
Alamat:
Desa Mertasinga, Gunungjati
Capaian PAD:
Rp 6,1 juta (2019), Rp 27,9 juta (2020), Rp 15 juta (Juli 2021)
Hasil Produksi:
379.752 Kg



Nama TPI:
Pangkalan Pendaratan Ikan Karangreja
Alamat:
Desa Karangreja, Suranengg
Capaian PAD:
Rp 2,8 juta (2019), Rp 16 juta (2020), Rp 14,2 juta (Juli 2021)
Hasil Produksi:
193.926 Kg

Nama TPI:
Pangkalan Pendaratan Ikan Citemu
Alamat:
Desa Citemu, Mundu
Capaian PAD:
Rp 0 (2019), Rp 0 (2020), Rp 0 (Juli 2021)
Hasil Produksi:
402.457 Kg



Nama TPI:
Pangkalan Pendaratan Ikan Ender
Alamat:
Desa Ender, Pangenan
Capaian PAD:
Rp 0 (2019), Rp 0 (2020), Rp 0 (Juli 2021)
Hasil Produksi:
40.333 Kg



Nama TPI:
Pangkalan Pendaratan Ikan Ambulu
Alamat:
Desa Ambulu, Losari
Capaian PAD:
Rp 0 (2019), Rp 0 (2020), Rp 0 (Juli 2021)
Hasil Produksi:
150.333 Kg



bisa memberikan retribusi bagi daerah. Ia menilai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Cirebon belum berbuat banyak.

“Belum ada respon apa-apa. Cuma menurut saya, kalau ingin menghidupkan TPI lagi, KUD harus merekrut nelayan dan memberinya modal bantuan perahu untuk para nelayan. Paling tidak, dikasih pinjaman saja, agar mereka lepas dari bakul dan tidak terjerat hutang,” terangnya.

Di tempat lain, TPI Jaka Bhakti Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, juga merasakan hal serupa. Ketua TPI Jaka Bhakti, Tasman mengatakan dari 200 perahu ukuran di bawah 5 GT, sebagian besar adalah milik para bakul. Dengan kata lain, sebagian besar nelayan Bungko Lor adalah nelayan buruh.

“Meski perahu di sini banyak, tapi hanya 3 persen yang milik pribadi nelayan. Nelayan yang tidak mempunyai perahu hanya menjadi buruh, atau paling tidak mereka hutang kepada bakul,” kata Tasman.

Ia pun berharap, pemerintah daerah dapat merespon persoalan tersebut dengan memberikan pinjaman bagi para nelayan agar keluar dari jeratan hutang maupun untuk pengembangan TPI Jaka Bhakti.

“Selama ini hanya ada 20 nelayan yang masih menjual melalui TPI. Saya berharap dinas itu bisa ngasih pinjaman seperti KUR. Sekali lagi ini bukan meminta, tapi lebih kepada menyediakan dana pinjaman,” harapnya.

Meski begitu, Tasman bersyukur karena saat ini TPI Jaka Bhakti sudah mulai mendapat keuntungan dan bisa memberikan retribusi untuk daerah. “Alhamdulillah Juli lalu kami retribusi untuk daerah Rp 1 juta



R Cakra Suseno, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon

dan bulan kemarin Rp 500 ribu,” ujarnya.

Saling Lempar Kewenangan

Persoalan mangkraknya TPI sebenarnya telah lama disadari Kepala Seksi TPI DKP Kabupaten Cirebon Nia Nurhayati. Ia pun mengamini banyak nelayan terjerat hutang ke bakul yang berakibat TPI menjadi tak terfungsikan. Sementara ini, kata Nia, yang memilih menjual melalui TPI adalah nelayan yang tidak terikat bakul.

“Padahal kalau dari sisi harga, di TPI lebih transparan dan lebih tinggi ketimbang melalui bakul,” jelasnya.

Untuk itu, Nia mengingatkan, agar nelayan tak harus mengandalkan bakul kembali, para nelayan diharapkan membentuk kelompok dan koperasi.

“Paling minimal, nelayan itu

punya koperasi meski skalanya kecil karena itu cara agar mendapatkan bantuan pemerintah. Maupun untuk cadangan kalau alat tangkap rusak maupun ketika sakit. Mereka bisa menggunakan uang dari kelompok itu,” tuturnya.

Karena itu, Nia berharap Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon dapat mendorong para nelayan membentuk koperasi maupun melatih manajemen pengelolaan TPI yang belum sehat.

“Walaupun TPI ada beberapa yang sudah berjalan, bukan berarti manajemen koperasinya sudah sehat. Dinas Koperasi harus mau turun tangan membenahi juga. Meski secara teknis wewenang kami,” ujarnya.

Menanggapi itu, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon Edwin mengaku telah terlibat melatih pengelolaan KUD di



Bungko Lor agar tak mengandalkan para tengkulak.

“Kita sedang berusaha merekrut anggota untuk membangun koperasi. Sekarang lagi dicoba, cuma memang ada kendala di permodalan,” ungkapnya.

Edwin juga sedang menerapkan kerjasama antar koperasi, agar saling membantu permodalan bagi TPI. Selain itu, ia juga telah bersosialisasi langsung, untuk merubah pola pikir nelayan agar tak terjerat tengkulak.

Selanjutnya, untuk menindak para bakul, Nia mengatakan telah menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar mengawasi para bakul yang tak taat aturan.

“Saya sudah minta Satpol PP untuk menindak, hanya mungkin mereka sedang banyak fokus garapan lain. Kalau dulu ada polisi dari perikanan sekarang enggak ada. Makanya kita minta bantuan Satpol PP,” kata Nia.

Namun Kepala Seksi Kerjasama Satpol PP Kabupaten Cire-

bon, Sa’di membantah jika telah menerima informasi dan laporan dari DKP untuk menindak para tengkulak di TPI.

“Sejauh ini karena saya baru, belum ada informasi atau laporan. Kalaupun ada, mungkin itu pengurus lama,” kilahnya.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Cakra Suseno juga berpendapat, jika selama ini DKP hanya menggaungkan para nelayan untuk berkelompok. Padahal nelayan yang sebenarnya itu tidak memiliki waktu untuk mengatur itu.

“Aktivitas nelayan yang asli ya berangkat pagi, pulang siang, setelah itu memberesi perahu. Sementara jika sasarannya adalah kelompok, kelompok nelayan di lapangan itu didominasi oleh para bakul,” jelasnya.

Sementara mengenai penerbitan bakul melalui Satpol PP, Cakra menilai itu tak memiliki dasar hukum. Pasalnya bakul itu sama seperti pedagang lainnya. Apalagi persoalannya, nelayan

juga merasa dibantu oleh para bakul. Sehingga jika para bakul itu ditindak justru sama saja membunuh para nelayan.

Seharusnya jika benar Pemda memang lagi konsen untuk mendongkrak PAD melalui sektor perikanan, kata Cakra, maka harus serius memberikan bantuan secara fisik seperti pemberian perahu dan alat tangkap dengan syarat hasil tangkapannya dijual melalui TPI. “Itu juga salah satu strategi agar bisa menghidupkan TPI lagi,” tegasnya.

Namun sebelum itu, Cakra juga menambahkan pentingnya pembenahan data nelayan. Pasalnya selama ini data nelayan yang tercatat oleh DKP bukan data murni.

“Dari total 17.965 orang, berapa yang memang benar-benar nelayan? Karena kondisi di lapangan yang punya perahu, alat tangkap dan modal itu hanya para bakul, sementara nelayan yang asli itu hanya buruh saja,” tandasnya. •Lan

Hanya Andalkan Program Pendampingan

DKP akan terus bertahan pada program yang telah berjalan dengan menyosialisasikan dan pendampingan untuk TPI dan para nelayan. Dinas Koperasi dan UMKM juga senada.



foto: foto - Quasy/da

Hasil retribusi pengelolaan TPI di Kabupaten Cirebon terbilang masih sangat rendah. Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Cirebon hingga Juli 2021 misalnya, nilai PAD yang diperoleh hanya mencapai Rp 41,72 juta dari targetnya Rp 89 juta di akhir tahun.

Padahal, fasilitas TPI di Kabupaten Cirebon dinilai telah cukup memadai. Hampir dari jumlah total 7 TPI semuanya memiliki gedung, tempat sandar perahu, alat timbangan serta sarana lainnya.

Penyebabnya, DKP menilai, karena para nelayan telah lebih dulu memiliki keterikatan dengan para tengkulak, sehingga tak bisa menjualnya melalui TPI yang ada. Alhasil pendapatan

retribusi yang mestinya diperoleh untuk peningkatan PAD menjadi sangat kecil.

Kondisi demikianlah yang membuat DKP Kabupaten Cirebon terus berupaya mengerahkan para nelayan untuk mendorong pelelangan di TPI. Sejauh ini DKP mengaku telah memberikan pembinaan dan sosialisasi sebagai upaya menyadarkan para nelayan agar tidak terjerat pada tengkulak.

Upaya pemberdayaan nelayan kecil dan TPI untuk berkelompok yang didampingi oleh penyuluh perikanan telah berjalan. Kepala Seksi TPI DKP Kabupaten Cirebon Nia mengatakan, DKP baru mampu melaksanakan program pendampingan bagi para nelayan lantaran minimnya anggaran.

“Sudah dua tahun anggaran kita terkena *refocusing* akibat Covid 19. Memang agak sulit bergerak untuk yang sifatnya bantuan atau pemberian insentif. Jadi dalam dua tahun ini, yang dilaksanakan baru bisa melakukan pendampingan saja,” ucap Nia, kepada reporter Cirebon Katon.

Nia menerangkan pentingnya mengelompokkan para nelayan sesuai jenis alat tangkap, bahan bakar dan alat lainnya dengan membentuk koperasi. Jika telah berkelompok dan diadministrasikan secara benar, kata Nia, tentu akan menjadi potret koperasi tingkat kecil sehingga dampaknya memiliki tabungan modal bagi para nelayan.

Sayangnya, Nia mengungkapkan, dari sekitar 17 ribu nelayan di Kabupaten Cirebon



hanya beberapa saja yang sadar untuk berkelompok.

“Fungsi kita di DKP saat ini untuk menyadarkan mereka berkelompok. Itu pasti bisa menyelesaikan persoalan ketergantungan pada bakul nantinya,” jelas Nia.

Nia mengaku program insentif bagi para nelayan dari Pemda sempat berhenti. Terakhir pada 2019 lalu. Pada 2020 pun harus difocusing untuk penanganan pandemi. Terlebih sejak awal 2021 hingga sekarang program pendampingan pun baru bisa dilakukan kembali.

“Kita berharap semoga di tahun 2022 bisa kembali normal dan bisa direalisasikan program yang pernah berjalan,” terangnya.

Tak sendirian, DKP telah menggandeng dinas koperasi

dan penyuluh perikanan untuk bahu-membahu mengingatkan nelayan mengenai kebutuhannya. Terlebih juga untuk menyosialisasikan keberadaan peraturan daerah mengenai TPI dan retribusi.

“Jadi kita sedang membangun rasa simpati nelayan terhadap dinas ketika mereka butuh, teman-teman TPI siap bantu. Kami mencoba menumbuhkan rasa kebutuhan mereka terhadap pengurus TPI agar bisa menggantikan keberadaan bakul,” kata Nia.

Selain itu, Nia juga mengaku, DKP telah menggandeng BPJS untuk meringankan dan memberi jaminan kesehatan bagi para nelayan. “Itu salah satu yang dinas coba lakukan sebagai pemberdayaan nelayan kecil mau-

pun bagi pengurus TPI. Hanya saja proses pendampingan ini baru dikerjakan oleh 10 orang,” keluhnya.

Keterbatasan SDM pendamping, pada akhirnya berdampak pada manfaatnya yang masih sangat sedikit dirasakan. “Yang baru terasa itu di TPI Bungko Lor dan Bondet sudah menyumbangkan PAD karena ada pendamping,” jelasnya.

Pada 2022 nanti, Nia mengatakan, DKP akan merevisi Perda. Pasalnya Perda saat ini sudah usang dan tidak relevan dengan kondisi sekarang. Tahapannya tengah membuat kajian akademis. Rencananya Perda akan ditambahkan dua poin mengenai retribusi dan penegakan hukum di TPI oleh Satpol PP.

Sementara itu, Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon Edwin Yudianto juga mengatakan telah intens menyosialisasikan dan memberi pengarahan kepada para nelayan. Edwin mengaku akan siap dan turun ke lapangan langsung guna melihat persoalannya.

Edwin menjelaskan, untuk menanggulangi tengkulak yang menjadi penghambat retribusi PAD, Dinas Koperasi akan terus melakukan pembinaan dan sosialisasi keuntungan memiliki koperasi. Salah satunya, ihwal permodalan yang bisa diperbantukan. Selanjutnya ada diklat koperasi untuk meningkatkan pemahaman SDM koperasi yang bersertifikat.

“Kita telah anggarkan itu, program pembinaan, pemberdayaan dan diklat. Kami akan arahkan ke sana untuk pembenahan koperasi. Jadi kalau pemahamannya sudah bagus akan bisa bekerja dengan profesional dan dampaknya koperasi bisa maju,” jelas Edwin. •Sar

Rahasia TPI Karangsong Sumbang PAD 10 Milyar



foto: Quasy/da

Seperti diketahui, hasil produksi laut yang dilelang melalui TPI Karangsong hingga Agustus 2021 tercatat mencapai 12,6 juta kg. Selain itu mereka pun memiliki kas koperasi senilai Rp 80 miliar. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan TPI Karangsong. Reporter Cirebon Katon mewancarai Ketua KUD Mina Sumitra Karangsong Indramayu H Darto. Berikut petikannya:

Seperti apa pengelolaan TPI di Karangsong, mengapa memiliki PAD yang begitu besar?

Sebelumnya, saya perlu tekankan bahwa apa yang telah dicapai TPI Karangsong ini, tak semudah seperti membalikan telapak tangan. Semua itu melalui proses yang panjang. Apalagi tak mudah untuk mendorong para nelayan menjual hasil lautnya melalui TPI. Karena pada dasarnya nelayan pemilik kapal sering lebih dulu terikat dengan para tengkulak.

Jadi sekali-lagi, enggak ujug-ujug langsung besar. Banyak tahapan yang telah kita lewati. Dari memfasilitasi nelayan mulai

permodalannya dari bekal berlayar, memberi asuransi kesehatan, sampai membantu jika ada yang terjerat hukum. Bahkan mereka yang bukan anggota koperasi juga bisa kita bantu perbekalan untuk mereka berlayar.

Jadi kalau kita mengajak nelayan untuk menjual di TPI tapi kita tidak menanggung kebutuhan nelayan. Para nelayan juga akan enggan menjual melalui TPI. Makanya kita bantu itu.

Jadi nelayan yang menjual melalui TPI, ditawarkan keuntungan?

Benar. Kita tawarkan pelayanan

yang didapatkan jika melelang di TPI Karangsong. Apalagi perkembangan bisnis sekarang begitu lu-larbiasa. Hal-hal yang biasa nelayan dapatkan melalui tengkulak. Kita hadirkan di koperasi. Misalnya kemudahan mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU) melalui koperasi. Jadi kalau nelayan bermasalah pun kita selesaikan bersama.

Selain itu, kita keluarkan untuk asuransi nelayan ada klinik gratis untuk anak buah kapal (ABK). Bahkan kalau untuk nahkoda dan pemilik kapal, jika mereka mau berobat ke tempat lain atau rumah sakit lain juga kita bantu biaya.

Kemudian kita juga siapkan



H. Darto (Kepala KUD Mina Sumitra)

pasar yang baik bagi nelayan. Kalau pasar kita bagus akhirnya nelayan datang sendiri. Bahkan sering juga nelayan yang dari luar daerah memilih melelang ke sini.

Sebenarnya nelayan yang menjual ke tengkulak harga kan enggak bisa komplain. Tapi kalau di TPI bakul kita datangkan, dan nelayan bisa memilih harga tertinggi. Tapi bagaimana dengan nelayan yang telah makan modal dari tengkulak. Akhirnya mau-tidak mau harus ke bakul. Makanya kita selalu ingatkan kalau nelayan ingin besar jangan terjerat dengan tengkulak.

Lalu bagaimana dengan para tengkulak?

Tentu hal yang tak kalah penting, kita juga bermitra dengan para bakul. Selain memberi kemudahan para nelayan kita juga mem-

beri keuntungan para bakul. Jika bakul enggak ada modal kita bantu. Para bakul ini kita fasilitasi dan banyak juga yang berasal dari luar daerah termasuk dari Celancang, Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Sementara dari mana modal koperasi itu berasal?

Itu berangkat dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang serius di Kabupaten Indramayu. Salah satunya ihwal retribusi yang harus dialokasikan ke beberapa pos untuk sosial. Kunci utamanya pertama sejauh mana keseriusan aturan Perda diterapkan.

Perda mengatur salah satunya semua hasil tangkapan laut wajib melalui tempat pelelangan yang dikelola melalui koperasi. Meskipun bukan anggota nelayan harus menjualnya melalui TPI.

Dalam koperasi ada kesepakatan simpanan wajib dan pokok bagi anggota. Aturan utamanya 3 persen dari hasil pelelangan wajib menjadi simpanan. Contohnya nelayan yang dapat Rp 100 juta hasil pelelangan berarti ia harus menyisihkan Rp 3 juta untuk simpanan.

Dari simpanan wajib itu, kita alokasikan untuk membantu permodalan para nelayan juga.

Saat ini berapa yang telah bergabung menjadi anggota koperasi KUD Mina Sumitra?

Anggota yang tercatat sekitar 5 ribuan namun yang aktif hanya 70 an. Tapi dari 70 orang itu, tiap orangnya memiliki kapal lebih dari satu. Jadi yang bergabung di koperasi rata-rata para nelayan yang usahanya stabil. Kebanyakan kapal yang ada berukuran 30-140 GT yang ada di Karangsong.

Berapa angka retribusi bagi yang melelang di TPI?

Rincian retribusi itu kita ambil dari omzet pelelangan. Kita enggak pilih-pilih kapal semuanya 5 persen. Hasil produksi itu dipotong retribusi untuk daerah 2,25 persen. Sisanya dikelola oleh kami untuk Asuransi Nelayan (Asnel), kesehatan nelayan maupun modal nelayan.

Bagaimana dengan peran dinas kelautan?

Kita tidak mengandalkan program dinas. Dinas hanya memberi penyuluhan kesadaran untuk nelayan dengan penegakan perda. Kita hanya fokus pada manajemen koperasi. Kalau koperasi kuat dan mendatangkan bakul. Saya yakin nelayan datang sendiri. Alhamdulillah karena perdanya jalan, dinasnya jalan kita semua mudah untuk mengelola TPI. Bahkan saat ini kas kita mencapai Rp 80 miliar.

Ini semua berkat para pendahulu kita yang telah awal mula mengembangkan TPI. •Suf

Kasi Perikanan Kota Cirebon: TPI Kejawanan Kejar PAD 1 Miliar



foto: foto: Quasy/da

Selain TPI Karangsong, ada juga TPI Kejawanan yang mampu hasilkan PAD hingga Rp 800 Juta pada 2021 ini. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan TPI Kejawanan. Reporter Cirebon Katon juga mewancarai Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Dinas Pangan, Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kota Cirebon Indah Romadona. Berikut petikannya:

Seperti apa kondisi TPI di Kota Cirebon?

Sebenarnya kalau TPI yang ada di Kota Cirebon sendiri, untuk TPI kecil seperti TPI Cangkol, TPI Pesisir dan TPI Kesenden itu tidak aktif. Kalau di dunia perikanan tangkap kan ada 2 istilah. Ada Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan ada Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sampai saat ini tiga TPI di Kota Cirebon hanya digunakan sendiri oleh para nelayan sekitar untuk

kegiatan lain yang berhubungan dengan kenelayanan.

Bagaimana dengan TPI Kejawanan?

TPI Kejawanan merupakan TPI paling aktif. Produknya berupa ikan beku, jadi kita enggak melelangnya secara terbuka melainkan lelang tertutup antara nelayan dengan calon pembeli. Ikan-ikan yang dibongkar dari kapal selanjutnya akan dimasukkan ke cold storage yang ada di

TPI Kejawanan. Karena para nelayan yang berlabuh menggunakan sistem rantai dingin agar kualitas ikan tetap terjaga.

Sementara untuk harga ikan yang dilelang kita sudah memiliki harga standar yang ditentukan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Saat ini Pemerintah Kota Cirebon hanya menyediakan bangunan dan sarana untuk TPI saja. Dari ta-

hun 2019 akhir, kita sudah menyerahkan pengelolaan dan penyelenggaraan lelang tersebut kepada pihak ketiga dengan menggunakan koperasi yang bergerak dibidang perikanan. Jadi bukan sembarang koperasi.

Selanjutnya, DPPKP hanya bertugas memonitoring, pengawasan dan pembinaan saja. Dan pihak koperasi berkewajiban melaporkan ke DPPKP.

Bagaimana nilai retribusi bagi yang melelang di TPI Kejawanan?

Retribusi kita ambil dari hasil tangkapannya setelah tahu harganya berapa. Nah, dari situ keluar istilahnya Raman. Nanti dari Raman itu kita ambil 3,5 persen untuk retribusi daerah. Ketika kapal itu berlabuh di PPN Kejawanan dan melakukan pelelangan secara otomatis akan dikenakan retribusi.

Itu berlaku bagi seluruh kapal. Baik itu kapal domisili Kejawanan maupun dari luar Kejawanan. Jadi tugas kita hanya menyediakan fasilitas agar banyak kapal yang bersandar di Pantai Kejawanan dan melakukan lelang di TPI.

Lalu, berapakah PAD yang didapatkan dari TPI Kejawanan?

Tahun 2020 lalu, kita menargetkan PAD itu sebesar Rp 750 juta dan mampu menghasilkan PAD sebesar Rp 870 juta. Tahun sekarang kita targetkan sebesar Rp 1,1 miliar dan sudah masuk hingga Agustus itu sekitar Rp 800 juta. Biasanya pada akhir tahun banyak bongkaran lagi. Kita akan genjot lagi untuk capai target PAD.

Berapa rata-rata hasil produksi kapal dalam sekali berlayar?

Setiap kapal bisa memproduksi paling sedikit 2 ton dan paling banyak bisa mencapai 70 ton dalam sekali



Indah Romadhona, Kasi Pengelolaan dan Hasil DPPKP Kota Cirebon

berlayar. Kapal paling kecil ukuran 28 GT dan paling besar 196 GT.

Selama 3 bulan para nelayan berada di laut. Mereka biasa berlayar ke Kalimantan, Sulawesi sampai ke wilayah timur Indonesia. Tergantung registrasi dari kapal itu sendiri, untuk bongkar hasil tangkapan juga tidak sembarang tempat. Setiap satu kapal hanya bisa bongkar hasil tangkapannya pada 3 pelabuhan perikanan.

Kalau dari Cirebon berarti bisa mendaratkan ikan ke Jakarta dan Tegal. Begitu pun sebaliknya, yang dari Jakarta dan Tegal bisa membongkar di sini.

Sementara pendapatan sangat bergantung pada kualitas dari hasil

tangkapan. Tercatat pada 2020 TPI Kejawanan menghasilkan 4 juta kg dan TPI Cangkol 2 juta kg.

Kalau yang di TPI Kejawanan, kebanyakan kapal berjenis penangkap cumi karena banyak lampu-lampu di sekeliling kapal. Tapi selain cumi para nelayan juga menangkap tenggiri, kakap, lemuru, young bun hingga ikan kuwe.

Untuk kapal yang berukuran besar, kebanyakan milik perusahaan-perusahaan yang ada TPI Kejawanan. Jadi ketika bersandar maka langsung diproses untuk dieksport. Namun para ABK merupakan tenaga-tenaga kerja lokal maupun dari luar daerah seperti Brebes dan Tegal. •Soy

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Ingin Cirebon Lebih Ramah Disabilitas



Assalamualaikum Wr Wb

Bapak-Ibu anggota dewan yang terhormat, perkenalkan nama saya Abdul Mujib (35), ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC). Saya turut serta mewakili teman-teman untuk menyampaikan keluhan infrastruktur Kabupaten Cirebon yang masih belum cukup ramah terhadap para difabel.

Meski dari waktu ke waktu pembangunan sarana bagi difabel semakin membaik. Akan tetapi hingga hari ini, saya menilai Kabupaten Cirebon masih belum sepenuhnya menjawab apa yang menjadi hak dan kebutuhan kami. Dari segi aksesibilitas di ruang publik misalnya, kami masih cukup kesulitan dalam mengakses berbagai sarana atau fasilitas dengan keterbatasan jasmani yang beragam.

Saya masih melihat, dari mulai pusat perbelanjaan, fasilitas publik, hingga rumah ibadah sekalipun masih belum ramah terhadap mereka yang berkebutuhan khusus secara fisik. Untuk itu saya berharap Kabupaten Cirebon ke depan bisa lebih memperhatikan para difabel.

Karena bagaimanapun, difabel merupakan bagian dari masyarakat harus diberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan dan hajat hidupnya.

(Abdul Mujib/Aktivist Difabel/Cirebon)

Jalur Alternatif Butuh Perbaikan

Bapak/Ibu Dewan yang saya hormati. Perkenalkan saya Kasdim (29), warga Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati. Saya ingin melaporkan kondisi jalan Syekh Datul Kahfi, alternatif penghubung Wanakaya-Cangkring, yang sekarang kondisinya tidak terlalu baik dan minim lampu penerangan.

Kami warga setempat merasa cukup prihatin dengan kondisi aspal jalan yang kian hari semakin rusak. Meskipun tidak seluruhnya dalam keadaan rusak, tetapi ada titik lokasi yang memang mendesak untuk segera diperbaiki demi alasan keamanan.

Saya khawatir jika keadaan ini dibiarkan terus-menerus bisa timbul korban, dan bukan tidak mungkin dapat memicu aksi kriminal yang bisa menyasar warga setempat, atau warga lain yang sedang melintas.

Gelapnya kondisi jalan diperparah dengan adanya kepulan asap hasil pembakaran limbah jerami padi terutama pasca panen. Sehingga selain gelap, juga membuat jarak pandang semakin terbatas. Untuk itu kami berharap jalur alternatif ini diperbaiki sesegera mungkin dan lampu penerangannya juga ditambah, agar mobilitas warga menjadi lebih aman dan lancar.

(Kasdim/Buruh/Wanakaya)



Warga Minta Fasilitas MCK



Salam hormat kepada anggota dewan yang terhormat, perkenalkan saya Siti (21) asal Desa Kerandon, Kecamatan Talun. Saya ingin menyampaikan permintaan kepada Bapak/Ibu Dewan agar menyediakan fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di sekitar tempat saya tinggal.

Hal ini bertujuan agar warga tidak lagi harus memanfaatkan air sungai untuk berbagai kebutuhan seperti mandi, cuci dan kakus. Karena selain bisa berdampak pada kesehatan warga, mengingat kualitas air sungainya yang saya rasa tidak terlalu jernih. Saya juga khawatir, limbah yang dihasilkan dari aktifitas warga nantinya, akan mengganggu ekosistem yang ada di sungai.

Saya berharap Bapak/Ibu Dewan bisa segera mengambil langkah dan segera menindaklanjuti hal ini minimal mendorong pembuatan MCK umum bagi warga.

(Siti (21)/Mahasiswa/Kerandon)

Usul Pembukaan Jalur Khusus Sepeda

Assalamu'alaikum Wr Wb

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Perkenalkan saya Yan Priyadi, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Cirebon (Selibon). Sebagai goweser (Pesepeda), saya ingin mengusulkan kepada bapak/ibu dewan melalui dinas yang berwenang, agar membuat jalur khusus sepeda.

Hal ini mengingat jumlah pengguna sepeda di Cirebon semakin bertambah. Apalagi jika akhir pekan tiba. Saya kira sudah saatnya bagi pemerintah untuk menambal jalur sepeda lengkap dengan fasilitas dan sarana pendukungnya.

Selain untuk memastikan keselamatan dan kelancaran mereka dalam bersepeda, hal ini juga dimaksudkan agar Cirebon dapat menjawab kebutuhan warganya yang perlahan mulai menjadikan sepeda sebagai salah satu pilihan moda transportasi mereka.

Saya berharap usulan ini dapat didengar dan dengan segera terealisasi. Terimakasih sebelumnya kepada Cirebon Katon berkenan menerbitkan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

(Yan Priyadi/Wiraswasta/Cirebon)



Rumah Rengganis Tawarkan Ketenangan Bagi Pecinta Buku

Mengawinkan kopi dan buku, Rumah Rengganis menjadi tempat bersatunya para pegiat literasi. Pendirinya juga seorang sastrawan. Seperti apa?



Ditemani secangkir kopi, beberapa mahasiswa tengah asyik dengan buku bacaannya. Sebagian ada pula yang tengah berdiskusi. Mereka begitu akrab menikmati. Suasana ini didapati ketika berkunjung ke Rumah Rengganis yang berada di Taman Kota Ciperna, Blok R2 No 11 Cirebon.

Sesuai namanya, tempat ini adalah rumah yang disulap menjadi tempat bar kopi dipenuhi dengan rak buku. Ada perpustakaan mini dengan ribuan buku beragam tema di ruang tamu. Mulai dari buku tentang isu sosial, politik, sejarah hingga sastra. Dari buku penerbit indie hingga mainstream karya penulis lokal maupun internasional.

Buku-buku ini merupakan koleksi pribadi yang bisa dibaca gratis dan sebagian khusus untuk dijual. Maka tak heran jika Rumah Rengganis, sering menjadi ruang pertemuan santai bagi para komunitas literasi di Cirebon.

Rumah Rengganis berdiri sejak 2019 silam. Pendirinya adalah Nissa Rengganis. Nissa berkeinginan menghidupi sastra di Cirebon. Sebab menurutnya, selama ini tidak banyak anak Cirebon yang hobi di sastra. Selain itu, belum ada tempat nongkrong yang ramai dikunjungi para sastrawan.

“Kalaupun ada kafe, tidak banyak pengunjung yang ngopi sambil berdiskusi tentang sastra,” ucap Nissa, saat ditemui Cirebon Katon.

Tekad Nissa ingin menghidupi sastra di Cirebon pun tak setengah-setengah. Nissa juga mendirikan komunitas pecinta buku bernama Tjirebon Book Club pada tahun lalu. Anggotanya merupakan para pelajar SMA dan mahasiswa.

Tjirebon Book Club menggelar agenda rutin seminggu sekali. Dari membedah aneka buku, bincang bareng penulis, berlatih menulis hingga diseminasi karya tulisan. Hanya saja setelah wabah Covid-19 melanda Indonesia, kegiatan dilakukan secara virtual.



“Tapi sekarang pandemi Covid-19 mulai menurun. Jadi Tjirebon Book Club sudah mulai kumpul di Rumah Rengganis dan berdiskusi lagi,” ungkap Nissa.

Mengenal Lebih Dekat Nissa

Nissa, selain pendiri Rumah Rengganis juga seorang sastrawan. Ia penulis buku antologi puisi berjudul ‘Manuskrip Sepi’ yang telah berhasil menjadi nominasi buku puisi pilihan pada peringatan Hari Puisi Indonesia 2015 silam.

Beranih mempublikasikan karya sendiri. Dengan begitu, kita akan tahu sejauh mana publik menilai karya kita, kata Nissa.

Tak hanya itu, di antara karya

perempuan kelahiran Cirebon juga ada antologi esai ‘Pojo Sastara’ dan antologi puisi tunggal ‘Obituari Puisi’ (2018). Terbaru, Nissa juga tengah menyelesaikan buku puisi terbarunya berjudul ‘Suara Dari Pengungsian’.

“Saya senang kalau beberapa pembaca bilang karya saya menginspirasi mereka. Kalau pun pada akhirnya tulisan saya tidak bisa mengubah orang, paling tidak mengubah diri sendiri. “Semoga”, ungkapnya.

Nissa mengenal dunia baca sejak duduk di bangku SD. Ibunya yang seorang guru dan memiliki koleksi buku bacaan di rumah, membuat Nissa telah akrab dengan buku-buku sejak kecil. Sedangkan bakat menu-

lisnya diketahui, saat Nissa memenangkan lomba mengarang tingkat Sekolah Dasar.

Keterarikan Nissa pada dunia menulis juga dilanjutkan di bangku SMP. Saat itu, ia mengikuti ekstrakurikuler teater dan karya ilmiah remaja dan sering menulis cerpen untuk diterbitkan di majalah dinding sekolah. Kemudian ia mengikuti lomba menulis cerpen pelajar se-Kota Cirebon. Siapa sangka, tulisan tersebut berhasil menjadi yang terbaik. Nissa pun kemudian mewakili sekolah menjadi jurnalis junior di Mitra Dialog, sekarang Kabar Cirebon.

Memasuki SMA, Nissa semakin aktif mengikuti kegiatan sekolah yang bersinggungan dengan dunia literasi. Mulai dari aktif di kelompok teater, film, hingga klub buku pelajar. Sebelum mengelola Rumah Rengganis, Nissa juga banyak bergiat di berbagai komunitas sastra Cirebon seperti Lingkar Studi Sastra (LSS), Dewan Kesenian Cirebon bersama Almarhum Ahmad Syubbanudin Alwy, Rumah Kertas, dan lainnya.

Nissa bukan sarjana sastra, ia justru merupakan sarjana Ilmu Politik dari Universitas Negeri Jenderal Soedirman dan Program Magister Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada (UGM). Meski tak memilih jurusan sastra, namun tak menyurutkan semangatnya untuk menekuni sastra. Bahkan saat ini pun Nissa adalah pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Cirebon.

“Mengutip Jhon F Kennedy, jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya. Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya, ucap Nissa penuh semangat”. •Muiz

Telur Asin Khas Kroya Diolah dari Bata Merah

Sepasang suami istri dari Desa Kroya, Kecamatan Panguragan, ini sudah puluhan tahun menggeluti bisnis telur asin.

Maskud dan Arsini, awalnya hanya coba-coba menekuni produksi telur asin setelah melihat banyaknya peternak bebek yang ada di Desa Kroya.

Meskipun sempat ragu-ragu, mereka sepakat membuat telur asin dengan olahan resep sendiri.

Percobaan pertamanya gagal, karena telur-telur itu menjadi terlalu asin. Tak patah arang, setelah mengalami beberapa kekandasan, akhirnya Maskud dan Arsini berhasil menciptakan resep telur asin yang memiliki rasa legit dan gurih.

Mereka bahkan tak menyangka, jika telur asin hasil buaatannya, akan larap hingga sekarang.

Saat ini, Maskud dan Arsini mampu menjual 500 hingga 700 butir telur dalam setiap harinya. **•Soy**



Tarseni Pernah Jadi TKW di Taiwan

Sebelum menjadi legislator dua periode, Tarseni pernah menjadi TKW terlebih dahulu di Taiwan. Bagaimana kisah perempuan satu ini?



Perempuan itu begitu ramah. Tuturnya yang halus dan sikap hangatnya, membuat sosok satu ini bak seorang guru yang tengah mengayomi para muridnya.

Ia adalah Tarseni. Wanita satu ini, lahir dari lingkup keluarga yang biasa nan bersahaja. Kedua orangtuanya hanyalah seorang pedagang sembako kecil yang berjualan di sekitar rumah. Maka tak heran, jika lika-liku hidup Tarseni juga terbiasa untuk mandiri.

“Kebetulan saya anak pertama. Orangtua saya memang tidak pernah mengajarkan untuk mandiri, tapi mereka memberi sikap sebagai contoh,” jelasnya.

Sikap kemandirian Tarseni terlihat dari perjalanan hidupnya. Tarseni kecil, sempat memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Alasannya sederhana, ia begitu senang jika melihat orang lain sedang mengajari anak-anak. Hanya saja keadaan tak sependapat, Tarseni harus menyimpan jauh-jauh harapan berkuliah di jurusan PGSD setelah lulus



dari SMA 1 Suranenggala. Ia memilih bekerja untuk membantu keluarga.

“Awalnya saya ingin kuliah ngambil jurusan PGSD. Orangtua juga menawarkan tapi ya mau bagaimana lagi waktu itu. Saya mengerti jika hidup bukan tentang memuaskan ego saya pribadi. Saya memilih bekerja saja,” kenang perempuan kelahiran 1985 itu.

Tarseni menyadari banyak tanggung jawab yang harus ia pikul sebagai anak sulung. Terlebih ia juga memiliki dua adik yang harus tetap melanjutkan sekolah untuk dibiayai. Setelah bersusah-payah mencari kerja, Tarseni pun diterima oleh salah satu pabrik tekstil di Bandung.

Tak kurang dari 2 tahun, Tarseni bekerja di pabrik. Hingga suatu hari, pabrik membuka kesempatan bagi karyawan yang ingin bekerja ke luar negeri, karena pabrik tekstil Bandung memiliki hubungan kerjasama

ma dengan perusahaan tekstil di Taiwan. Diam-diam Tarseni mendaftar mengikuti seleksi.

“Saya tak menyalahkan kesempatan itu. Dari ribuan orang yang mendaftar, saya salah satu yang lolos seleksi. Mulanya orangtua tidak menyetujui karena saya perempuan. Tidak boleh jauh dari keluarga, tapi perlahan akhirnya diizinkan juga. Saya pun bekerja di Taiwan dari 2007 samai 2010,” ungkap perempuan kelahiran Suranenggala Kulon itu.

Sepulang dari Taiwan, ia langsung memutuskan untuk berumah tangga. Masa itu, ia gunakan untuk fokus pada keluarga, karena ia merasa tidak mempunyai kesenangan lain selain menjadi ibu rumah tangga.

Menjadi ibu rumah tangga nampaknya memunculkan rasa simpati Tarseni. Ia mulai tampak resah dengan melihat kondisi desanya yang mandek dan tak pernah ada perubahan.

Tarseni mulai berhasrat masuk dalam arena politik agar bisa membawa perubahan. Awalnya ia tak memiliki rencana untuk terjun dalam dunia tersebut. Tapi keluarga, kerabat hingga masyarakat justru mendukungnya. Tarseni pun mencoba membenarkan untuk maju.

“Saat itu memang kondisi di desa tidak pernah ada perubahan yang signifikan. Saya berkeinginan agar desa yang saya tinggali ini ada perubahan. Meskipun saat itu saya berangkat dengan kepala kosong, saya tak mengerti apa-apa tentang dunia politik. Tapi apa salahnya kalau mulai belajar dan mau mencobanya,” tuturnya.

Tepatnya menuju pemilihan legislatif tahun 2014, Tarseni pun diusung Partai Demokrat agar maju dalam kontestasi politik di Kabupaten Cirebon untuk memenuhi kuota perempuan.

“Akhirnya 2014 saya dicalonkan untuk maju dan alhamdulillah terpilih sampai sekarang. Itu semua berkat kepercayaan partai dan masyarakat, saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon selama dua periode. Pas periode pertama saya berada di komisi II sedangkan di periode kedua ini, saya dipindah ke komisi I,” jelasnya.

Hingga saat ini, Tarseni masih belum menyangka, kalau ia akan dipercaya dan terpilih menjadi legislator sampai dua periode. Pasalnya, jika melihat latar belakang pendidikannya, ia hanyalah lulusan SMA.

“Saya masih tidak menyangka sebenarnya, karena dilihat dari pendidikan yang lain jauh lebih bagus pendidikannya. Tapi ya saya akan terus membuktikan, bahwa tolak ukur menjadi seorang pemimpin tidak dilihat dari pangkatnya. Tapi tanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan. Saya akan terus berusaha untuk itu,” pungkasnya. •Lan

Mochammad Ghofur Akbar Sempat Jadi Supir Taksi

Ghofur pernah menjalani berbagai profesi serabutan agar hidup mandiri. Dari tukang parkir, kuli panggul hingga supir taksi. Bagaimana kisahnya?

Mulanya laki-laki itu bertekad menjadi seorang polisi. Berseragam coklat memang menjadi dambaan bagi banyak orang. Ghofur remaja yang lahir dari keluarga kuwu, saat itu juga bermimpi menjadi petugas keamanan negara. Ia berjuang keras untuk bisa masuk Akademi Kepolisian (Akpul). Ghofur mendaftarkan diri menjadi calon polisi muda di Bandung.

Namun takdir berkata lain, Ghofur yang semula bersemangat, pada 2010 harus menelan pil pahit saat mengetahui hasil tes penilaian calon polisi menentukannya tak lolos seleksi. Ia bahkan harus memutar haluan cita-citanya.

"Saat itu hanya 45 calon taruna yang berhasil lolos Akpul dan saya tidak termasuk. Akhirnya saya pindah dengan kuliah kedokteran di Universitas Trisakti, Jakarta, menuruti keinginan orang tua. Tapi hanya sampai semester dua, karena memang cita-cita awal saya menjadi polisi bukan jadi dokter," terang pemilik nama lengkap Mochammad Ghofur Akbar.

Ghofur pun memilih berhenti dari bangku kuliah. Ia memutuskan untuk membuka usaha dengan dibekali modal dari orang tuanya. Ghofur memulai bisnis penggilingan beras. Selain itu, ia juga membuka toko kelontong di tepi jalan dekat rumahnya. Kedua usaha itu pun berjalan lancar dan



tampak ramai hingga sekarang.

Dua tahun menjadi pengusaha nampaknya tak membuat Ghofur merasa senang dan puas. Ia bertekad menjalani hidupnya dari bawah tanpa campur tangan orang lain. Ghofur ingin bisa belajar merasakan keprihatinan.

Dengan rasa optimis, Ghofur akhirnya menyerahkan kedua usaha yang telah didirikannya itu kepada saudaranya. Sehingga, ia bisa mulai menjalani hidup dengan perjuangannya sendiri. Ghofur pun mulai bekerja serabutan dari menjadi tukang parkir, kuli panggul hingga supir taksi.

"Pada 2016 lalu saya pernah menjadi supir di salah satu perusahaan taksi di Cirebon. Sebelumnya saya juga sempat menjadi tukang parkir dan kuli panggul di area pasar Tegalbugug. Itu semua saya lakukan karena ingin mandiri serta belajar priha-

tin bahwa mencari uang itu susah. Dan memang benar, apalagi dulu belum ada taksi *online*," ungkap, pria kelahiran 1991 itu.

Saat awal menjadi supir taksi, Ghofur hanya dibekali mobil bekas dari perusahaan untuk menarik penumpang. Namun, seiring berjalannya waktu, *rating* (penilaian) pelanggan taksinya justru semakin naik. Alhasil, ia pun diberi *reward* sebuah mobil brio sebagai pengganti mobil sebelumnya.

Biasanya, Ghofur menunggu penumpang di sekitar CSB Mall Kota Cirebon dan tempat-tempat hiburan. Dari tempat itulah ia bisa mendapat pelanggan hingga ratusan. Para pelanggan taksinya pun akhirnya terbiasa menghubungi Ghofur untuk diantar jemput. Saking banyaknya penumpang yang ingin diantar, Ghofur sampai pernah mengalami kejadian unik diluar dugaannya.

"Saya punya 200 pelanggan yang semuanya perempuan. Kadang pelanggan minta diantar jemput di waktu yang sama. Mereka pernah saya antar bersama dengan enam pelanggan lain. Semua saya barengin di satu mobil dan mereka mau. Bagi saya itu unik, biasanya kan penumpang enggak mau dibarengin tuh," kenangnya, sambil terkekeh.

Selama menjalani profesi sebagai supir taksi, Ghofur sengaja tidak memamerkan identitas aslinya yang berasal dari keluarga mampu. Ia memilih menjadi orang sederhana tanpa membawa nama orang tuanya. Bahkan, Ghofur juga sempat berbohong kepada para penumpangnya jika ia bukan warga asli Cirebon.

Dari pengalaman manis pahitnya menjadi supir taksi, Ghofur mendapat banyak kesan dan pesan. Sambil mengingat kembali, ia menceritakan betapa sulitnya mencari seratus ribu saja dalam sehari. Bahkan, ia pernah sampai berebut pelanggan dengan supir lainnya.

Meski begitu, Ghofur mengungkapkan bahwa menjadi bagian dari profesi tersebut merupakan sebuah momen yang sulit dilupakan. Terlebih, ketika mereka bisa saling berbagi jika salah satu temannya tak mendapat uang untuk disetorkan.

"Saya senang ketika menjadi supir taksi. Di saat teman atau anak buah saya tidak mendapat uang atau kurang untuk setoran. Saya kadang bagikan uang hasil narik saya untuk mereka. Berkesan, makanya sampai sekarang pun saya masih berteman baik dengan mereka," kata Ghofur.

Siapa sangka jika Ghofur yang semula adalah supir taksi, kini merupakan anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Nasdem periode 2019-2024. •Sar

Komisi I Ingatkan Prokes Pilwu Serentak

Lima desa di Kecamatan Lemahabang bersiap gelar Pilwu serentak. Komisi I meminta untuk menyiapkannya dengan penerapan prokes yang ketat di setiap TPS.



Foto: foto: doksetwan

Pelaksanaan pemilihan kuwu (Pilwu) serentak di Kabupaten Cirebon tahun ini dipastikan digelar tetap sesuai jadwal, yakni pada November 2021. Berbeda dengan pemilihan sebelumnya, Pilwu serentak 2021 kali ini diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Oleh karena itu, tolak ukur keberhasilannya ditentukan oleh kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan agar tak terjadi penularan. Hal tersebut diperkuat sebagaimana Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa pada masa pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, pada tahun ini ada 135 desa dari 38 ke-

camatan di Kabupaten Cirebon yang akan menggelar Pilwu secara serentak. Lima desa diantaranya berada di Kecamatan Lemahabang yakni, Sindanglout, Asem, Lemahabang Kulon, Belawa dan Cipeujeuh Wetan.

Komisi I DPRD Kabupatn Cirebon pun mengunjungi kecamatan Lemahabang. Mereka ingin mengetahui sejauh mana kesiapan pelaksanaannya nanti di lima desa yang berada di Kecamatan Lemahabang. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan Pilwu serentak berjalan aman dan disiplin sesuai protokol kesehatan (prokes).

"Pilwu sekarang kemungkinan akan berbeda dengan pelaksanaan Pilwu sebelumnya. Harus

menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Maka untuk menunjang hal tersebut diperlukan juga pengamanan yang maksimal dari tim keamanan yang ada," ujar Abdul Rohman, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon saat berkunjung.

Sementara itu Camat Lemahabang Edi Prayitno mengatakan, kelima desa tersebut telah siap melaksanakan Pilwu. Ia mengaku selalu berkordinasi dengan Muspika dan Puskesmas Sindanglout mengenai persiapan prokes pelaksanaan Pilwu serentak nanti.

Kepala Puskesmas Sindanglout Dr Sutara mengaku siap mengawal pelaksanaan Pilwu Serentak tahun 2021 khususnya di wilayah Kecamatan Lema-



habang. Namun, sebelum itu, Sutara meminta agar aturan mewajibkan prokes harus dikaji lebih matang dan disepakati oleh semua yang berkepentingan.

"Baik secara konsep maupun teknis. Saya tidak ingin ketika Pilwu Serentak telah digelar, ada oknum yang menjadikan prokes sebagai salah satu alasan dalam pengaduan pelanggaran Pilwu," katanya.

Sebagaimana yang telah direncanakan pada pelaksanaan Pilwu, kata Sutara, Dinkes Kabupaten Cirebon akan menyiapkan satu tenaga kesehatan di setiap TPS. Ia bersama tim kesehatan kecamatan akan ditugaskan merapid tes para panita Pilwu untuk

memastikan keadaannya sehat.

Sementara ini, ada tiga poin yang akan menjadi sorotan tim kesehatan sesuai petunjuk Dinkes Kabupaten Cirebon dalam Pilwu, yakni mencegah terjadinya penularan Covid-19, menitikberatkan prokes, dan antispasi pada saat pelaksanaan

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon pun telah menyampaikan aturan bagi panitia Pilwu untuk menyiapkan cadangan orang, untuk mengantisipasi bilamana ada panitia yang mengalami positif.

Selain itu, sebelum Pilwu, Dinkes Kabupaten Cirebon akan memaksimalkan program vaksinasi di desa-desa yang akan

menggelar Pilwu. Hingga Agustus 2021 lalu, Dinkes mencatat program vaksinasi telah mencapai 60 persen.

Upaya percepatan vaksinasi tersebut pun mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon akan terus mendorong pemberian vaksin secara menyeluruh. Terutama bagi 135 desa yang akan melaksanakan Pilwu serentak.

Sementara menjawab keaman prokes, perwakilan Satpol PP Kabupaten Cirebon mengatakan, akan ada pemisahan antara aduan pelanggaran Pilwu dengan pelanggaran prokes.

Satpol PP akan memantau penerapan prokes pada tahapan pelaksanaan Pilwu. Mulai dari pembentukan dan pelantikan TPS, penjaringan bakal calon, seleksi administrasi, pembentukan dan pelantikan ketua KPPS serta penetapan calon dan pengambilan nomor urut.

Pemantauan juga dilakukan pada saat kampanye Pilwu, pengambilan dan penghitungan suara, pleno penghitungan suara tingkat desa hingga pelantikan kuwu.

Selain itu, untuk laporan pengaduan pelanggaran prokes telah disiapkan tim satuan gugus kecamatan. Sementara pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Satpol PP akan menempatkan 1 sampai 2 anggotanya di setiap TPS.

Kapolsek Lemahabang Kompol Sunarko juga mengaku telah berkoordinasi dengan Linmas kelima desa tersebut untuk menginventarisasi keamanan di lokasi. Selain itu, agar pemungutan suara berlangsung aman, Polsek Lemahabang juga akan meminta bantuan 1 pleton Dalmas dan 1 pleton dari Brimob. •Muiz

Komisi II Tinjau Pembuangan Limbah PT RCPI

PT RCPI diduga telah membuang limbah ilegal yang merugikan warga Kedungjaya. Komisi II pun bersicepat sidak ke lapangan. Bagaimana hasilnya?



Foto: foto: dok setwan

Sejak tahun lalu, warga Desa Kedungjaya, Kedawung mengeluhkan banyaknya limbah yang dibuang sembarangan ke salah satu sungai sekitar tempat tinggal. Pasalnya selain mengganggu pemandangan, hal tersebut membuat air sungai tidak mengalir dan bau busuk menguar. Bahkan hingga terjadi kebakaran di area sungai.

Sedikitnya ada 4 RT yang merasakan dampak limbah tersebut. Para warga Kedungjaya menduga limbah tersebut, berasal dari PT Riyana Cipta Pangan Indonesia (RCPI) yang berdampingan dengan tempat tinggal. Mereka pun telah meminta pemerintah daerah

menindak tegas bagi pelaku pembuangan limbah ilegal.

Mendapat laporan itu, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon pun menyidak dan mengecek perizinan sekaligus perpajakan ke PT RCPI. Agenda tersebut dihadiri Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon.

Tiba di lokasi, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon meminta tanggapan PT RCPI mengenai keluhan masyarakat tersebut. Namun Manager HRDA PT RCPI Dadang H membantah, laporan masyarakat mengenai

masalah limbah yang berasal dari perusahaannya.

“Memang masyarakat banyak mengeluh ke kami mengenai limbah. Namun sebenarnya itu bukan limbah PT RCPI. Bisa saja limbah tersebut milik pabrik tetangga yang letaknya tepat di tengah pabrik kami. Karena posisi kami lebih besar dan lebih menonjol sehingga masyarakat sekitar menilai limbah berasal dari pabrik kami,” kilah Dadang.

Meski begitu, R Cakra Suseno, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon pun menanyakan jumlah produk yang diproduksi PT RCPI. Sedangkan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Ka-



bupaten Cirebon M Ridwan juga meminta penjelasan jenis limbah yang dihasilkan PT RCPI.

Dadang kemudian menjawab, PT RCPI berawal dari perusahaan keluarga yang hanya memproduksi agar-agar atau jelly dalam kemasan. Seiring dengan kemajuan yang dicapai, perusahaan tersebut berinovasi dengan berupaya melebarkan produk dan penggunaan mesin teknologi modern. Akhirnya didirikanlah PT RCPI pada tahun 2020.

Menurutnya, saat ini PT RCPI hanya memproduksi makanan dan minuman ringan berbasis coklat. Sebanyak 15 produk makanan dan minuman dihasilkan PT RCPI dan

telah berizin BPOM.

Saat ini terdapat tiga divisi di PT RCPI. Pertama, Divisi Minuman yang fokus pada produksi minuman dengan merek Happy Es Teller dan Es Cincou. Kedua, Divisi Cincou yang fokus pada produk berbasis coklat dengan merek Happy Time. Ketiga, Divisi Cookies yang fokus pada produksi cookies / kue kering dengan merek Happy Time.

Dadang pun menyebutkan, limbah PT RCPI adalah kulit telur dan potongan cincou yang terbuang dan tidak tersaring. Menurutnya, dari dua jenis limbah tersebut hanya potongan cincou yang dibuang ke sungai.

Sedangkan, limbah kulit telur yang membuat bau tak sedap menguar dibakar di tempat yang berlokasi jauh dari pemukiman masyarakat.

Untuk itu, Dadang mengaku, PT RCPI telah membuang limbah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Bahkan, kata dia, PT RCPI sering dicek secara berskala oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Dadang juga mengatakan, Kedalaman lima sumur yang dimiliki PT RCPI sudah sesuai dengan aturan perizinan yakni, sekitar 85-90 meter dengan debit air 35 meter kubik per detik untuk setiap titik sumur. Hal tersebut merujuk pada surat dan dokumen perizinan tentang sumur atau air tanah PT RCPI.

Selain soal limbah, Cakra juga menanyakan retribusi pajak PT RCPI. “Bagaimana dengan pajak yang dilakukan PT RCPI?,” tanya Cakra.

Dadang pun menjawab, alat produksi yang dimiliki PT RCPI seperti forklift, mesin dan sumur telah taat perpajakan. Bahkan ia mengaku, mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon atas ketaatan pajak.

Setelah mendapat laporan PT RCPI dan melakukan pengecekan di lapangan, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menyimpulkan dugaan masyarakat terhadap PT RCPI tersebut tidak sepenuhnya benar. Hanya saja, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengimbau agar PT RCPI bisa meningkatkan ketaatan terhadap aturan pajaknya.

“Selanjutnya permasalahan limbah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat sekitar akan diteruskan ke Komisi II akan ditindaklanjuti Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon,” pungkas Cakra. •Muiz

Komisi III Desak Normalisasi Irigasi Sungai Ciberes

Menindaklanjuti keluhan para petani Ambit yang sawahnya tak mendapatkan air. Komisi III minta UPTD PSDA normalisasi Sungai Ciberes?



Foto: foto: doksetman

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung di Desa Kepongpongan, Talun. Pada kunjungan kali ini, Komisi III bertujuan menggali data dan menyampaikan aspirasi masyarakat Waled yang sawahnya tak mendapatkan air dari bendungan Ambit.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto, mengatakan para petani di Kecamatan Waled mengeluhkan irigasi areal persawahan khususnya di sepanjang jalur Su-

ngai Ciberes yang tak mendapat jatah air. Akibatnya mereka pun tak bisa menanam selain musim penghujan.

“Para petani tersebut hanya dapat menanam 1 kali dalam satu tahun. Itu pun mengandalkan air hasil tadah hujan, bukan dari air sungai,” ujar Hermanto.

Sehingga, kata Hermanto, permasalahan ini harus segera diatasi. Pasalnya jika tidak, maka akan berpotensi merugikan sektor pertanian di wilayah itu. Komisi III berharap yang terbaik kepada pihak-pihak yang berwenang termasuk UPTD PSDA agar tidak menambah panjang

persoalan petani atas kerugian yang mereka alami karena masalah irigasi.

Selain normalisasi sungai, Komisi III juga menginginkan adanya penambahan sumber air, pasalnya tidak mungkin hanya mengandalkan air dari bendungan Ambit saja. Karena kondisi dan suplai air yang terbatas tak mampu untuk mengairi seluruh kawasan persawahan dan lingkungan sekitar.

Sementara itu, Kepala Bidang Irigasi Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Ahmad Rizal juga membenarkan jika irigasi di Ambit bermasalah. Sebagaimana yang



tercatat, seluas 1.982 hektare persawahan untuk masa tanam 2 (MT2) kesulitan mendapatkan air. “Daerah irigasi Ambit yang paling banyak permasalahannya berada di saluran induk Sungai Ciberes,” ungkap Rizal.

Rizal menyarankan, agar normalisasi sungai segera dilakukan dan pembenahan tanggul sepanjang Sungai Ciberes dapat ikut dibenahi. Selain itu, ia juga menyinggung soal gorong-gorong bekas pembangunan jalur kereta api ganda milik PT Kereta Api Indonesia yang menghambat aliran air.

“Kita perlu mendiskusikan hal itu, dengan harapan ada-

nya rekonstruksi gorong-gorong tersebut,” tegas Rizal.

Rizal berharap, UPTD PSDA dapat bersinergi agar irigasi daerah Ambit bisa kembali mendapatkan air hingga di Desa Dompoyong Kulon, Gebang. Dia juga akan menghitung kembali debit air, agar irigasi dapat optimal mengairi persawahan. “Supaya jika musim hujan, air tidak berlebih yang mengakibatkan banjir, dan tidak kekurangan air ketika kemarau,” kata Rizal.

Menanggapi hal itu, Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Hendi, mengungkapkan penyebab irigasi di Ambit tak berair akibat

terjadinya peningkatan sedimentasi di Sungai Ciberes. Menurutnya, hingga saat ini Sungai Ciberes belum pernah dilakukan pengerukan kembali.

“Karena terkendala anggaran juga, pengerukan yang semestinya setiap tahun dilakukan belum dapat dikerjakan. Namun kalau kondisinya memang sudah tidak dapat ditunda maka akan dilakukan pengerukan,” ujar Hendi.

Hendi pun menambahkan, jika persoalan irigasi Ambit sudah dari dulu. Pasalnya ketika hujan maka material seperti pasir dan batu juga ikut terbawa dan mengendap di saluran Sungai Ciberes. Akibatnya terjadi kenaikan sedimentasi. Ditambah lagi, kata Hendi, kondisi jaringan irigasi yang baik hanya 24 persen saja.

Hendi mengungkapkan, PSDA Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS) agar dilakukan normalisasi Sungai Ciberes. Namun hingga saat ini, belum ada realisasi untuk menormalisasikan sungai.

Untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi di sepanjang daerah irigasi Ambit, Hendi akan menginventarisasi terlebih dahulu semua permasalahan yang terjadi. Hendi menegaskan akan secepatnya membenahi aliran Sungai Ciberes. Ia pun sangat mendukung rencana penambahan masa tanam di wilayah daerah irigasi Ambit untuk mencegah kerugian para petani.

“Kita juga berharap dalam jangka panjang nanti untuk sumber air dapat diambil dari Bendungan Cipanundang jika sudah beroperasi,” pungkas Hendi.

•Soy

Komisi IV Minta Puskesmas Bangodua Aktif Dampingi Ibu Hamil

Seorang ibu hamil meninggal karena telat mendapat perawatan akibat BPJS-nya tak aktif. Komisi IV minta Puskesmas Bangodua evaluasi.



Foto: foto: dok setawan

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) mengunjungi Puskesmas Desa Bangodua, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon H Mahmudi, bercerita jika Minggu lalu, ia mendapatkan pesan dari salah satu warga Bangodua.

Tepatnya pukul 00.00 Minggu malam, Mahmudi mengaku menerima whatsapp dari ayah Mawar (bukan nama sebenarnya) yang meminta bantuan untuk menghubungi pihak RS Arjawinangun, lantaran Mawar yang hamil mengalami pendarahan hebat.

“Saya coba bantu dengan menghubungi Direktur RS Arjawinangun untuk membantu karena BPJS Mawar nonaktif. Akhirnya pihak RS pun melayani dengan sigap. Namun naas, meski telah disesar, tetapi nyawa bayi dan ibunya tak bisa diselamatkan,” ungkap Mahmudi.

Mahmudi sangat menyesali tak bisa berbuat banyak meski telah berusaha membantu dengan semaksimal mungkin. Ia pun mengingatkan ke depannya, peran Puskesmas Bangodua bisa mengontrol lebih intens bagi ibu-ibu yang tengah hamil.

“Ini menjadi catatan untuk Puskesmas Bangodua. Saya minta kepada ibu bidan tolong

untuk terus memantau ibu yang hamil agar kejadian ini tidak terulang,” tegasnya.

Akibat musibah ini, Mahmudi juga mengaku telah meminta jajaran direktur RS yang ada di Kabupaten Cirebon, agar terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu terutama bagi wanita hamil.

Sementara itu, Fitri, salah satu bidan di Puskesmas Bangodua juga mengungkapkan, jika kronologi ibu hamil yang meninggal telah diwanti-wanti oleh pihak Puskesmas sejak kehamilan pertama.

“Almarhumah itu sudah pendarahan ketika 6 bulan kehamilan pertamanya, saat itu



baru sedikit lalu keluar banyak darah lagi. Saya sudah menyarankan kepada keluarganya untuk segera merujuk ke Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Poned) dan RS. Tapi terkendala BPJS karena punya tunggakan besar,” ungkap Fitri.

Kepala Puskesmas Bangodu Eti Entin Efwanita, pun berjanji akan memitigasi agar kejadian tersebut tidak terulang, dengan menitikberatkan pada program pendampingan ibu hamil.

“Hal ini memang harus secepatnya dicegah ke depannya, terutama mengenai kekurangan administrasi seperti BPJS. Sebelum kejadian ini, kita di Puskesmas sudah membahas mengenai ketersediaan ruangan pelayanan untuk persalinan atau biasa disebut dengan program *Mom and Baby Spa*,” jelas Eti.

Rencana pembangunan ruangan persalinan, kata Eti, dipicu karena secara geografis Desa Bangodua jauh dari pusat kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa (Pemdes) juga sudah menghibahkan lahan kosong untuk pembangunan pelayanan 24 jam seluas 500 meter persegi.

“Paling tidak kalau sudah ada ruang khusus persalinan, tidak hanya Desa Bangodua yang merasakan manfaatnya. Tapi desa yang lain juga mudah mengaksesnya karena masih satu wilayah. Karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya.

Namun sebelum itu, Eti pun berharap, kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, untuk memperjuangkan honor bagi para tenaga kesehatan (nakes). Pasalnya selama ini, sebagian be-

sar nakes Puskesmas Bangodua masih bersifat sukarelawan.

“Kedatangan bapak dan ibu dewan ke sini, saya sangat berharap kalau nakes juga diperhatikan. Karena tenaga honor di sini ada yang bekerja lebih dari 10 tahun, total semuanya ada 23. Bahkan ada yang sudah 21 tahun bekerja namun insentif yang didapatkan belum seberapa,” kata Eti.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina mengatakan, sudah jengah mendengar keluhan kasus nakes yang tidak dibayar atau yang honorinya tak dipenuhi. Pasalnya saat ini, telah ada anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk para honorarium.

Ia pun meminta Dinkes Kabupaten Cirebon, mengevaluasi dan secepatnya merealisasikan honor bagi para nakes. Siska menilai Dinkes memiliki database jumlah nakes yang telah bekerja lama, sehingga seharusnya hal ini tidak terjadi.

“Saya pernah didatangi oleh 5 orang nakes. Ada perawat ada juga bidan dari satu Puskesmas. Mereka bercerita kalau sudah bekerja 11 tahun namun belum mendapat honor insentif. Di Bangodua ada 23 orang, paling tidak di PKD dulu yang sudah bekerja di atas 10 tahun. Ini PR buat Dinkes yang harus direalisasikan,” tegasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Cirebon Suhari, yang hadir dalam kunjungan pun mengakui meski Dinkes mempunyai database nama-nama petugas Puskesmas di seluruh Kabupaten Cirebon, namun untuk dana insentif masih dalam proses pengajuan.

“Kalau untuk insentif nakes, kita juga perlu verifikasi maka prosesnya sedang berjalan,” pungkas Suhari. •Lan

Titisara Ciawigajah jadi Kampung Ternak

Di Ciawigajah, Pemdes menyediakan lahan khusus untuk para peternak kambing dan sapi. Menariknya kandang-kandang itu dibuat layaknya tempat tinggal. Seperti apa?



foto: foto: Quany/dk

Memanfaatkan tanah titisara, di setiap sudut Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, tampak terjejer puluhan bangunan semi permanen. Dari kejauhan, sekilas terlihat seperti deretan rumah tempat tinggal biasa. Namun jika diperhatikan, alih-alih rumah para warga, bangunan-bangunan tersebut merupakan kandang hewan kambing dan sapi yang dibuat layaknya perkampungan. Lebih dari tiga puluh kandang kambing dan sapi, berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektare ini. Bentuk kandang itu pun sengaja dibuat mirip seperti rumah panggung, dengan tujuan agar kandang mudah dibersihkan dari kotoran.

Pemandangan bak kampung peternakan ini, salah satunya tepat berada di Blok Kliwon, Desa Ciawigajah. Pemdes Ciawigajah menginisiasi pendirian pondok ternak ini guna meningkatkan perekonomian desa. Pasalnya sebagaimana diketahui, mata pencarian warga Desa Ciawigajah didominasi oleh

petani dan peternak.

“Dengan adanya lahan khusus peternakan ini, kami berharap minimalnya bisa meningkatkan kesejahteraan serta mengangkat perekonomian masyarakat khususnya bagi para peternak sekitar,” jelas Kuwu Desa Ciawigajah Nunung Nurhadi.

Sebelumnya, pendirian kampung ternak ini merupakan hasil musyawarah antara Pemdes Ciawigajah dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) desa sejak lama. Hanya saja baru dioperasikan pada 2016 silam demi memberikan dorongan dan semangat serta fasilitas bagi para peternak lokal.

Tak hanya di Blok Kliwon, fasilitas lahan khusus peternakan ini pun juga tersebar hampir di setiap blok yang ada di Desa Ciawigajah. Dari total 6 blok, terdapat 6 lahan khusus peternakan yang semuanya berjalan aktif. Walhasil, sejak adanya lahan khusus ini, para kelompok ternak berlomba-lomba meningkatkan produktifitas peternakannya masing-masing.



“Dari setiap blok memang sudah ada lahan peternakan. Hanya satu blok yang belum memiliki lahan ternak karena tidak ada tanah titisara di sana. Jadi kita alihkan ke blok lain sehingga di satu blok itu ada dua,” jelas Nunung.

Nunung juga mengatakan, selain upaya peningkatan ekonomi, berdirinya kampung peternakan tak lain dalam rangka menjaga kesehatan lingkungan masyarakat. Pasalnya, semula kandang ternak milik para warga pernah berdiri di tengah perkampungan penduduk. Setelah dinilai mencemarkan kebersihan lingkungan, Pemdes Ciawigajah memindahkannya

ke lahan khusus.

“Ternak-ternak yang dulunya ada di pertengahan kampung kita, sekarang sudah tidak ada lagi. Karena dipindahkan semua ke lahan titisara. Lahan itu digunakan khusus untuk tempat peternakan milik warga,” ujar dia.

Dengan mengelompokkan lahan peternakan di masing-masing blok seperti itu, Nunung mengaku, telah berhasil mengubah status peternak yang mulanya hanya sebatas sambilan menjadi peternak tetap. Sehingga, jumlah peternak yang ada di Desa Ciawigajah saat ini telah bertambah hingga 200 orang

dengan kepemilikan rata-rata 5 sampai 20 ekor ternak kambing.

Keberadaan para peternak juga memberikan banyak manfaat bagi desa. Salah satunya mengenai pembangunan infrastruktur. Meski tidak ada retribusi alokasi khusus untuk Pendapatan Asli Desa (PAD), kata Nunung, para peternak telah memiliki inisiatif untuk membantu perbaikan infrastruktur desa yang telah rusak dari hasil swadaya.

“Kami mengikuti irama para peternak, jadi tidak serta merta harus berkontribusi untuk PAD. Tetapi mereka membantu memperbaiki infrastruktur seperti jembatan, akses jalan bahkan pembangunan masjid desa,” imbuhan Nunung.

Pengembangan kampung ternak ini juga telah bekerjasama dengan UPTD Pertanian Beber untuk menopang SDM peternak. Para peternak dilatih oleh UPTD mengenai cara beternak yang benar dan segala hal mengenai peternakan.

“Jadi antara para peternak dengan pemdes saling mendorong untuk sama-sama membangun kesejahteraan. Saat ini juga telah terbentuk kelompok peternak tangguh yang memang sudah terbiasa dan profesional beternak. Kampung ternak ini pun akan terintegrasi dengan program pengolahan pupuk organik,” lanjut Nunung.

Rencananya, menurut Nunung, Pemdes Ciawigajah akan mengalokasikan Rp 400 juta per tahun untuk pengembangan kampung ternak ini dengan sistem bagi hasil.

“Kita meyakini peternakan ini juga menjadi salah satu usaha yang pasti membantu peningkatan perekonomian serta menjadi tulang punggung perekonomian desa,” tandasnya. •Sar

Wanasaba Lor Siapkan Bumdes Miliki Produk Makanan

Pemdes Wanasaba Lor tengah fokus menciptakan produk industri makanan melalui Bumdes. Apa alasannya?



Gunawan (Kuwu Wanasaba Lor)

Pemerintah Desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, tengah berjibaku menyiapkan Bumdes untuk menciptakan satu produk industri makanan yang diharapkan menjadi ciri khas desa.

Alasannya, Kuwu Desa Wanasaba Lor Gunawan, mengatakan Desa Wanasaba Lor memiliki potensi dalam bidang industri makanan. Terbukti dari jumlah 4.500 penduduk tak sedikit yang bergulat pada industri rumah makan. Di antara rumah industri yang telah berdiri, telah memproduksi jenis kue seperti

emping hingga keripik pisang. Hanya saja masih dikelola secara pribadi.

Oleh karena itu, kata Gunawan, Pemdes Wanasaba Lor berkeinginan mengolahnya menjadi berbagai produk yang difasilitasi melalui Bumdes. Ia mengaku telah mengkomunikasikan rencana itu kepada para warga.

"Karena selama saya menjabat 4 tahun ini, saya baru memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Sementara sektor untuk peningkatan ekonomi belum tergarap," kata Gunawan.

Pada akhirnya, Pemdes Wa-

nasaba Lor hingga saat ini pun belum mampu mendapatkan pemasukan untuk PAD. Apalagi desa tak memiliki titisara karena padatnya perumahan. Gunawan menerangkan Pemdes hanya memiliki warisan tanah bengkok seluas 10 hektare.

Hal itu yang menjadi pematik awal bagi Gunawan. Untuk berbenah sekeras mungkin, agar Wanasaba Lor mampu menelurkan satu produk yang akan menghasilkan PAD. Ia pun telah merencanakannya pada tahun ini dengan mengalokasikan anggaran dari dana desa.

"Ya kita masih mengandalkan dana desa untuk saat ini," jelas Gunawan.

Selain bertujuan tingkatkan PAD, Gunawan memiliki harapan program ini akan mampu kenalkan ekonomi warga serta menggerakkan masyarakat agar mau terlibat langsung dalam membangun desa. Meskipun para warga tak semuanya merupakan pengusaha industri olahan makanan.

"Walaupun kita tahu ada yang pekerjaannya menjadi buruh, kuli bangunan, karyawan hingga pedagang. Tapi minimal sesuai harapan saya saat maju menjadi kuwu, saya ingin membantu ekonomi warga dan membangun desa lebih maju," pungkasnya. •Lan

Lemahabang Kulon Raup Ratusan Juta dari Retribusi Pasar

Pasar desa milik Pemdes Lemahabang Kulon tak absen hasilkan ratusan juta PAD pada tiap tahunnya. Bagaimana bisa?



Jaelani (Sekdes Lemahabang Kulon)

Riuh tampak terasa saat berkunjung di Desa Lemahabang Kulon. Pasalnya selain berada di sentra kecamatan, desa ini memiliki pasar desa yang telah berumur lama sejak 1901. Saat ini pasar dikelola langsung oleh pemerintah desa.

Awalnya pasar itu merupakan milik Desa Lemahabang. Baru setelah ada pemekaran, terjadilah kesepakatan, jika pasar masuk ke wilayah Lemahabang Kulon. Pasar desa ini mulai dikelola oleh pemdes sejak 2008 silam dan sempat dikelola juga oleh bumdes. Namun, karena dinilai SDM bumdes belum memadai,

akhirnya diambil alih kembali oleh pemdes.

Pasar desa Lemahabang Kulon memiliki luas lahan 6000 meter persegi. Di dalamnya telah berdiri beberapa bangunan kios dan los. Geliat perekonomian pasar desa ini pun tampak berdenyut kencang. Terbukti jika salah satu Pendapatan Asli Desa (PAD) Lemahabang Kulon sebagian besarnya berasal dari retribusi pasar.

"Tak kurang tiap tahun, pasar telah memberikan PAD bagi kami sejumlah Rp 360 juta rupiah," ungkap Jaelani, Sekretaris Desa Lemahabang Kulon.

Namun Jaelani menyayang-

kan, meski memiliki pasar desa, hanya sebagian kecil warga asli yang berjualan di sana. Padahal, pasar desa ini amat memprioritaskan warga lokal bagi yang ingin berjualan.

"Karena mata pencaharian warga kami memang beragam seperti ASN, karyawan hingga peternak. Jadi justru para pendatang yang banyak berjualan di sini," ucapnya.

Meski telah hasilkan ratusan juta, tampaknya tak membuat Pemdes Lemahabang Kulon berdiam di zona nyaman. Mereka tetap berkeinginan meningkatkan PAD. Pemdes berencana membuat kawasan wisata perdagangan khusus bagi warga setempat. Sehingga, warga dari luar desa lah yang akan datang berkunjung dan membeli produk asli desa.

"Rencananya memang begitu dan telah ada *site plan*-nya, namun kami masih merancang konsepnya seperti apa dan produk apa yang akan dimunculkan," jelas Jaelani.

Selain unggul pada sektor PAD pasar, Desa Lemahabang Kulon juga menyimpan prestasi di sektor kesenian dan olahraga. Di bidang kesenian, desa memiliki sanggar tari topeng yang pernah menjuarai perlombaan tingkat kabupaten. Sementara di bidang olahraga, ada klub sepak bola dan seni pencak silat. •Sar

Pangkalan Segera Bangun Agrowisata Hit

Pemdes Pangkalan tak ingin menyalakan potensi bendungan. Mereka akan menyulapnya menjadi agrowisata yang menarik.



Nuriman (Kuwu Desa Pangkalan)

Pemerintah Desa Pangkalan, Plered, Kabupaten Cirebon tengah bersiap menarik para wisatawan. Palsalnya, objek bendungan jati sawit dan hamparan lahan persawahan akan diproyeksikan menjadi agrowisata lokal kebanggaan desa. Saat ini, pembangunannya pun telah mencapai 25 persen.

"Meski masih tahap pengajuan kepada instansi. Kami telah melakukan pengecatan di jembatan dan beberapa bangunan yang ada di sekitar sana," ucap Robby Fauzi, Kaur Perencanaan Desa Pangkalan.

Rencananya, agrowisata ben-

dungan itu akan dibangun ala *instagramable* dengan beberapa areal foto, agar pengunjung merasa nyaman. Terutama untuk para kawula muda. Selain spot foto yang menarik, wisata ini pun akan menyuguhkan area bermain *flying fox* sebagaimana yang direncanakan.

Untuk pembangunan objek wisata ini, Pemdes Pangkalan telah menyediakan lahan seluas lima hektare. Terdiri dari tanah bengkok desa dan perairan. Dengan adanya agrowisata Bendungan Jati Sawit, mereka berharap penuh agar inovasi yang sedang digagasnya dapat menaikkan PAD.

"Kami ingin coba melakukan suatu inovasi yang nantinya bisa membantu kas desa serta ada *feedback*. Sehingga rencana desa wisata ini bisa berkelanjutan," ujar Robby.

Sebelumnya, untuk mengoptimalkan potensi yang ada, pemdes juga telah membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Pangkalan. Tujuannya agar dapat memberdayakan masyarakat dalam mengelola agrowisata bendungan ke depannya.

Selain itu, bumdes Pangkalan pun akan turut bersinergi mengembangkan serta memajukan agrowisata Bendungan Jati Sawit. Bumdes berencana membangun industri-industri kreatif di sekitarnya. Seperti rumah *souvenir* dan *merchandise*. Sehingga, pengunjung yang datang bisa membawa oleh-oleh dari wisata tersebut.

Hanya saja, kata Robby, butuh waktu yang tak sebentar untuk merealisasikan rencana wisata tersebut lantaran terkendala anggaran. Terlebih, masih banyak perizinan yang harus ditempuh. Termasuk pembenahan infrastruktur jalan ke area wisata itu, yang merupakan akses warga desa satu-satunya.

"Tapi kami berharap rencana ini bisa cepat terealisasi dan tak terbentur oleh anggaran," harapnya. •Sar

Bendungan Kelola Sampah Jadi Rupiah

Berkat kerja keras dan komitmen pemdes yang kuat, Desa Bendungan sukses mengelola timbulan sampah di wilayahnya.



Umar Bakhti (Sekdes Bendungan)

Duhulu Desa Bendungan memiliki permasalahan sampah yang cukup kompleks. Para warga terbiasa membuang sampah di lokasi penampungan sampah setempat tanpa diolah. Akibatnya bau busuk menguar dan meresahkan bagi yang melintasinya.

Namun berkat kerja keras Pemdes Bendungan sejak 2018 lalu, sampah-sampah di wilayahnya kini kian teratasi. TPS disulap menjadi tempat pengolahan sampah.

Tumpukan sampah didaur ulang menjadi barang yang bernilai rupiah. Bau busuk pun tak menguar lagi.

Keberadaan tempat pengolahan sampah di desa tersebut juga membuat kebiasaan masyarakat

membuang sampah berubah. Masyarakat tak usah capek-capek membuang sampah ke TPS. Sebab pemdes telah menyiapkan dua orang pengangkut sampah menggunakan kendaraan bajaj setiap dua hari sekali.

Setelah sampah terangkut semua di bajaj, tim pengangkut membawanya ke TPS. Setelah sampah tiba di TPS, sampah organik dan anorganik dipilih kemudian dicacah untuk diolah. Sedangkan sampah yang tidak bisa dikelola langsung dibakar.

"Di TPA kami ada tiga mesin. Pertama, mesin *inceneraktor* yang berfungsi membakar sampah yang tidak bisa dikelola. Contohnya sepatu bekas. Kedua, mesin pencacah yang berfungsi

mengolah sampah plastik. Ketiga mesin kelola yang berfungsi mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos," ungkap Kuwu Bendungan Tamad.

Untuk biaya operasional, para warga dikenakan iuran Rp 10 ribu dalam setiap bulan untuk satu KK.

"Bulan ini ada 500 rumah yang membuang sampah melalui bajaj sampah dari 900 rumah di Desa Bendungan. Saya berharap bulan depan bisa terus meningkat," ujar Tamad.

Sementara itu, hasil penjualan cacahan sampah dan iuran warga setiap bulan, dialokasikan untuk tiga orang pekerja di unit pengelolaan sampah ini. Sisanya untuk biaya operasional dan perawatan alat pengolahan sampah.

"Jika menghitung pendapatan dari hasil iuran warga Rp 10 ribu perbulan, selama setahun kami mendapat sekitar Rp 5 juta rupiah. Hasil itu untuk bayar tiga orang pengolah sampah dan biaya operasional," ungkapnya.

Tamad menyadari, tak mudah untuk menangani permasalahan sampah. Apalagi selama ini masih ada beberapa warga yang belum mematuhi aturan.

"Contohnya ada 3 KK dalam 1 rumah yang hanya membayar iuran 10 ribu. Namun, saya tak akan berhenti mengedukasi," jelas Tamad. •Muiz

Mohamad Luthfi



Membelakangi Laut

Ini bukan soal Indonesia. Ini cukup Kabupaten Cirebon saja --meski, bisa jadi Indonesia juga. Di laut yang kaya, nelayan Kabupaten Cirebon (dan Cirebon sebagai Kabupaten) masih miskin. Kenapa? Kualat, bisa jadi. Kok Bisa?

Jawabannya, karena kita telah membelakangi laut. Bahkan, bisa jadi telah melupakan laut. Benarkah? Mari kita cek dengan melihat fakta berikut.

Panjang garis pantai Kabupaten Cirebon mencapai 77,97 kilometer. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23/2014 bahwa batas maksimal wilayah laut provinsi sejauh 12 mil laut, dan batas bagi hasil kelautan kabupaten/kota maksimal sejauh 4 mil laut (6,4 KM).

Dengan demikian Kabupaten Cirebon memiliki wilayah laut yang dapat di eksplorasi seluas sekitar 499 kilometer persegi. Sungguh potensi laut yang luar biasa. Pemanfaatannya masih belum terlihat. Hanya sedikit untuk wisata pantai dan wisata hutan mangrove.

Dari sisi produksi perikanan tangkap, Kabupaten Cirebon pun jauh tertinggal dibanding dengan Indramayu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Cirebon, pada 2020, hanya Rp 27,9 juta. Sedangkan Indramayu mencapai Rp 10,5 miliar.

Katakanlah, itu karena garis pantai Indramayu lebih panjang dan jumlah nelayan lebih banyak. Tapi mari kita bandingkan, produksi tujuh TPI yang ada di Kabupaten Cirebon dengan satu TPI di Indramayu. Total produksi perikanan tangkap di tujuh TPI Kabupaten Cirebon, pada 2020, sebanyak 3.847 ton. Sedangkan, TPI Karangsong Indramayu 18.448.383 ton.

Sungguh perbedaan yang sangat mencolok. Satu TPI di Indramayu mengalahkan gabungan tujuh TPI di Kabupaten Cirebon. Ada apa dengan Kabupaten Cirebon? Bahkan, informasi terakhir, dari tujuh TPI yang ada di Kabupaten Cirebon, kini tinggal 4 yang hidup (berkativitas).

Salah satu masalah, kenapa TPI hidup segan mati

pun dibiarkan, karena konon kalah dengan para tengkulak. Nelayan terjebak hutang biaya berlayar, sehingga terpaksa menjual hasil tangkapannya pada tengkulak, bukan melelangnya di TPI.

Tentu saja, menjual ke tengkulak dengan harga yang tidak berpihak pada nelayan. Yang jadi pertanyaan: kenapa negara (pemerintah daerah) kalah dengan tengkulak? Matinya TPI adalah kekalahan negara.

Tak mampu memfasilitasi nelayan dengan alat tangkap dan kapal besar adalah hilangnya kepedulian terhadap jati diri bangsa, sebagai negara maritim. Laut begitu kaya. Untuk menuju lautan kekayaan itu, Kabupaten Cirebon punya pintu masuk (garis pantai) yang cukup panjang.

Lantas kenapa nelayan masih terbelakang, dan produksi hasil laut Kabupaten Cirebon masih tertinggal? Selain, lupa pada jati diri sebagai negara maritim, dan lupa akan sejarah kejayaan Pelabuhan Muara Jati di Gunung Jati; selama ini kehidupan masyarakat dan pemerintahan juga telah berposisi membelakangi laut.

Kebijakan pembangunan tak lagi menempatkan laut sebagai beranda depan. Sehingga, TPI seolah dibiarkan mati perlahan, nelayan tak mampu berlayar, dan kapasitas alat tangkap seadanya.

Saatnyalah, Kabupaten Cirebon memutar kembali sejarah kejayaan Pelabuhan Muara Jati, menjadi laut sebagai beranda depan. Pemerintah harus menjadikan prioritas utama pemanfaatan potensi kelautan.

Nelayan harus diberdayakan dengan keahlian dan alat tangkap yang canggih. Luas wilayah laut harus dieksplorasi untuk kemaslahatan, kebaikan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Jika tidak, bukan hanya dicap kualat pada sejarah dan identitas negara maritim, tapi juga merendahkan potensi diri: hanya diam menyaksikan nelayan (dan Cirebon sebagai Kabupaten) tetap miskin di tengah laut yang kaya.



SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH PEGAWAI



CIREBON PASTIKAN VAKSIN COVID-19





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Ayo Vaksin!

LINDUNGI DIRI
DAN KELUARGA DENGAN
VAKSINASI COVID-19

2021
ready for
VACCINE



#WajibPakaiMasker